

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, 30 Januari 2020 - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Tamu Kepala Perwakilan BPK Kalbar. Acara ini mengundang Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, **Joko Agus Setyono**, dan didampingi oleh Kepala Subaud Kalbar I, **Lukman Rudianto Lumban Tobing**.

LHP yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Barat pada Semester II TA 2019, namun merupakan pemeriksaan tematik dari Auditama Keuangan Negara I (AKN I), sementara BPK Perwakilan Kalimantan Barat di bawah Auditama Keuangan Negara VI (AKN VI), sehingga penyerahan LHP dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari AKN I.

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (aspek 3E) pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam hal ini, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan akuntabilitas pada KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Lingkungan pemeriksaan pada empat tahapan Pemilu yang meliputi Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) *Ad hoc* dan Kelompok Kerja (Pokja), Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu 2019 dan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan tiga satker KPU Kabupaten/Kota periode tahun anggaran 2018 dan sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2019.

Kriteria pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan Pemilu bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa, serta kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak yang bertanggungjawab.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang, dan KPU Kabupaten Kubu Raya telah

berupaya menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan perundangan, antara lain anggota BPP *ad hoc* terpilih telah cukup memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, pertanggungjawaban keuangan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu telah akuntabel, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian, antara lain data daftar pemilih khusus tidak lengkap untuk memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan, dan pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kubu Raya ke TPS tidak dilakukan secara tepat jumlah dan efisien.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR